

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**NURYANDINI
NPM. 2002110014**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 05 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURYANDINI
NPM : 2002110014

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II

Fitri Yumina, S.E., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 05 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURYANDINI
NPM : 2002110014

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 17 Januari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Farmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Svamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Fitri Yunina, S.E., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Anggota

Ermad MJ, S.E., M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 05 Maret 2025
Yang Menyatakan



Nuryandini

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuryandini
NPM : 2002110014
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Maret 2025

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
6FAMX129207830
Nuryandini

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE**

**NURYANDINI
NPM : 2002110014**

Pembimbing : 1.) Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
2.) Fitri Yunina, S.E., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Sampel penelitian sebanyak 96 responden yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

Kata Kunci: *transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan dana desa.*

***THE EFFECT OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND
PUBLIC PARTICIPATION ON VILLAGE FUND
MANAGEMENT IN TEUPAH TENGAH DISTRICT, SIMEULUE
REGENCY***

**NURYANDINI
NPM : 2002110014**

*Supervisor : 1.) Syamsidar, S.E., M.Si.,Ak.CA
2.) Fitri Yunina, S.E., M.Si*

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of transparency, accountability and community participation on village fund management in Teupah Tengah District, Simeulue Regency, both partially and simultaneously. This research method is quantitative with a type of causality research. The research sample was 96 respondents consisting of village officials and the community. Data collection used a questionnaire and data analysis used was multiple linear regression with the help of SPSS version 26. The results of the research showed that the variables of transparency, accountability and community participation simultaneously and partially had a significant effect on village fund management in Teupah Tengah District, Simeulue Regency.

Keywords: transparency, accountability, participation, and village fund management.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue**”, ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dan diperlukan untuk penyelesaian pendidikan program Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Ayahanda Rasudin dan Ibunda Sarianum, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah dan pengorbanan dan kerja keras

yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk selalu ada di sisi penulis dan menjadi alasan penulis untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi. Ayah, Ibu, putri kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.

2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Elviza, SE, M.Si., selaku ketua laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak., dan Ibu Fitri Yunina, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Dosen, dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Kepada saudara laki-laki penulis Fatchurroyan yang telah mendukung dan mendoakan setiap langkah penulis.

9. Kepada pemilik NPM 2003110005, terima kasih banyak telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, menjadi pendengar dan penasehat yang baik untuk penulis, dan menjadi rumah serta bagian dari perjalanan hidup penulis sehingga penulis dapat bertahan sejauh ini.
10. Untuk teman penulis, Anis Selfia, Meriliani, dan Tazkiatunnufus, yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam proses penyelesaian kuliah selama ini. Terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.
11. Diri saya sendiri, Nuryandini. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan dari banyaknya air mata yang sudah dikeluarkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati, akhirnya kepada ALLAH SWT jugalah penulis berserah diri dan berharap semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca, Amin.

Banda Aceh, 11 Januari 2025
Penulis,

Nuryandini
NPM : 2002110014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR-LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Landasan Teoritis	11
2.1.1 Dana Desa	11
2.1.1.1 Pengertian Desa	11
2.1.1.2 Pengertian Dana Desa	12
2.1.1.3 Sumber Dana Desa.....	14
2.1.1.4 Tujuan Dana Desa.....	15
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa	16
2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa	17
2.1.2.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa	18
2.1.3 Transparansi.....	21
2.1.3.1 Pengertian Transparansi.....	21
2.1.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa.....	22
2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa...	24
2.1.3.4 Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa	25
2.1.4 Akuntabilitas	27
2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas.....	27
2.1.4.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas	28
2.1.4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	29
2.1.4.4 Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	31
2.1.4.5 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	33
2.1.5 Partisipasi Masyarakat.....	35

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	35
2.1.5.2 Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa	36
2.2 Penelitian Sebelumnya	38
2.3 Kerangka Pemikiran	41
2.3.1 Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Dana Desa.....	41
2.3.2 Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Desa.....	42
2.3.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Dana Desa	44
2.3.4 Hubungan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dengan Pengelolaan Dana Desa.....	44
2.4 Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Desain Penelitian	48
3.1.1 Tujuan Penelitian	48
3.1.2 Jenis Penelitian	48
3.1.3 Horizon Waktu.....	48
3.1.4 Unit Analisis	49
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
3.2.1 Populasi Penelitian	49
3.2.2 Sampel Penelitian	50
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	51
3.3.1 Sumber Data Penelitian.....	51
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4 Definisi Operasional Variabel	52
3.5 Teknik Analisis Data	53
3.6 Pengujian Data.....	54
3.6.1 Pengujian Instrumen.....	54
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik	54
3.7 Pengujian Hipotesis	57
3.7.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	57
3.7.2 Uji Simultan (Uji-F).....	58
3.7.3 Uji Koefisien Determinasi r^2	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian	59
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	60
4.2.1 Deskripsi Variabel Transparansi	60
4.2.2 Deskripsi Variabel Akuntabilitas	61
4.2.3 Deskripsi Variabel Partisipasi	62
4.2.4 Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	62
4.3 Karakteristik Responden.....	63

4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	64
4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	65
4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	66
4.4 Hasil Pengujian Data	66
4.4.1 Pengujian Instrumen.....	66
4.4.2 Uji Asumsi Klasik	68
4.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	72
4.5 Uji Hipotesis Penelitian	73
4.5.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	73
4.5.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	74
4.5.3 Analisis Koefisien Determinasi	75
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	76
4.6.1 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue	76
4.6.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue	77
4.6.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue	78
4.6.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue	79
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah, 2023.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	50
Tabel 3.2 Skala Penilaian Jawaban Angket	52
Tabel 3.3 Definisi dan Operasional Variabel	52
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Transparansi	60
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Akuntabilitas	61
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Partisipasin.....	62
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa	63
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	64
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	65
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	66
Tabel 4.9 Uji Validitas	67
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas	68
Tabel 4.11 Uji Normalitas	69
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas.....	70
Tabel 4.13 Uji Autokorelasi Durbin Watson	71
Tabel 4.14 Analisis Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.15 Uji F	75
Tabel 4.16 Koefisien Determinasi.....	76

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	46
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	87
Lampiran 2 Skor Hasil Kuesioner.....	90
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas	94
Lampiran 4 Hasil Uji Reabilitas.....	96
Lampiran 5 Deskripsi Tanggapan Responden	97
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	103
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi	105
Lampiran 8 Tabel T.....	106
Lampiran 9. Tabel F.....	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Manajemen yang efektif dan akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan dana desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengawasi jumlah uang yang besar yang masuk ke desa. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan manajerial yang kompeten, yang dalam hal ini ditujukan kepada kepala desa dan aparatur desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya (Lalira, 2018: 63).

Sistem pengelolaan dana desa mengharuskan kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola dana yang diberikan dengan baik dan transparan. Dengan perencanaan alokasi dana desa, dan dukungan sistem manajemen yang baik, pemerintah desa dengan segala perangkatnya dapat melaksanakan semua kegiatan dengan baik dan sesuai dengan rencana bersama. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, kepala desa harus mampu mengelola dan mengalokasikan dana desa dengan baik, termasuk mendelegasikan tugas kepada perangkat desa serta mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program yang dibiayai oleh dana desa.

Perencanaan dan pelaksanaan merupakan bagian dari manajemen yang dibahas di sini. Setelah perencanaan semua program dan kegiatan, pelaksanaan harus dilakukan dengan tepat dan benar. Masyarakat dapat merasakan

kenyamanan dan kebahagiaan ketika sebuah rencana terealisasi. Memang, sebagian dari alokasi dana desa diperuntukkan bagi pembangunan. Pembangunan adalah salah satu cara bagi desa untuk melaksanakan kegiatannya dan menyediakan sarana untuk mencapai rencana dan tujuan bersama. (Nurman, 2015: 255). Segala bentuk kegiatan pembangunan tentunya harus didasari oleh kebutuhan masyarakat di desa tersebut.

Pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa memberikan wewenang kepada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa dan menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes). Sementara itu, Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ayat (2) menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Pada Ayat (3) disebutkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Pasal 3 prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya

bagi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut sangat ditentukan faktor tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di antara faktor transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Situmorang, 2021). Faktor transparansi menentukan pengelolaan dana desa dengan baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oktavia (2020) mengemukakan transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Faktor akuntabilitas sangat menentukan pengelolaan dana desa dengan baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nasihatun (2015:214) mengemukakan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang pengelolaan dana desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program pembangunan desa.

Tidak hanya faktor transparansi dan akuntabilitas yang dapat membuat pengelolaan dana desa dinyatakan baik, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah pada peran serta masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran dana desa. Masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam penggunaan dana desa (Isbandi, 2017:27). Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah agar masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan, mengingat dana desa sejatinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Karena, tiap desa memiliki program dan kebutuhan yang berbeda dalam hal pembangunan. Pemerintah desa perlu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan setiap program pembangunan, dengan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, dikhawatirkan pembangunan yang dilakukan tidak sejalan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Terlebih, terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, partisipasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan manfaatnya sesuai dengan kepentingan masyarakat. (Satria, 2021:1).

Femonema atau permasalahan yang terjadi di desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Hal ini tentu saja akan menghinai persyaratan dalam pengelolaan dana desa yang sudah di atur dalam undang-undang.

Aparatur desa seperti kepala desa, bendahara desa, Kasi pembangunan dan pelayanan seharusnya memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui transparansi dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat membantu mewujudkan pengoptimalan dana desa melalui partisipasinya. Hal itu bertujuan agar dana desa dapat dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa (Sari, 2022).

Penelitian ini memfokuskan pada dana desa serta alokasi dana desa di wilayah desa yang berada di Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Saat ini, terdapat 12 desa yang termasuk dalam wilayah tersebut, yaitu Desa Labuah, Nancawa, Abail, Simpang Abail, Lanting, Busung Indah, Kahad, Matanurung, Lasikin, Sua-sua, Batu-batu, dan Desa Situbuk. (BPS: Kecamatan Teupah Tengah Dalam Angka, 2023). Seluruh desa dalam Kecamatan Teupah Tengah ini menerima dana desa setiap tahunnya, seperti terlihat pada jumlah anggaran dana desa di Kecamatan Teupah Tengah di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah, 2023

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa	Realisasi Anggaran
1	Desa Labuah	Rp 805.517.000	Rp 802.717.000
2	Desa Nancawa	Rp 799.462.000	Rp 799.000.000
3	Desa Abail	Rp 770.409.000	Rp 720.009.000
4	Desa Simpang Abail	Rp 781.715.000	Rp 781.000.000
5	Desa Busung	Rp 844.920.070	Rp 843.851.445
6	Desa Lanting	Rp 805.517.000	Rp 805.517.000
7	Desa Kahad	Rp 799.462.000	Rp 788.700.000
8	Desa Matanurung	Rp 820.109.000	Rp 816.100.000
9	Desa Lasikin	Rp 901.115.000	Rp 901.000.000
10	Desa Sua-Sua	Rp 865.995.000	Rp 860.000.000
11	Desa Batu-Batu	Rp 805.000.000	Rp 800.000.000
12	Desa Situbuk	Rp 811.412.000	Rp 810.112.000

Sumber: Survei 12 Desa dalam Kecamatan Teupah Tengah, 2024.

Meskipun setiap desa di Kecamatan Teupah Tengah telah menerima anggaran dari pemerintah, pelaksanaan pemanfaatan dana desa di wilayah ini masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah lambatnya proses pencairan dana desa, yang menghambat terlaksananya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menyusun laporan penggunaan dana desa.

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa aparat desa di Kecamatan Teupah Tengah, terungkap beberapa permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi yang sering terjadi di beberapa desa. Salah satunya adalah ketidakmampuan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pengelolaannya. Selain itu, terdapat pula masalah terkait program yang tidak terselesaikan akibat pergantian kepala desa, yang mengakibatkan beberapa program tidak terlaksana dengan baik dan tepat. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah

desa (Wawancara: Aparatur Desa Abail, 15 Mei 2024). Padahal efektifnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah mestinya terbuka kepada masyarakat agar menjadi masukan bagi aparatur desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa ke depannya.

Masalah yang muncul terkait sistem pengelolaan alokasi dana desa adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam menjalankan sistem pemerintahan di tingkat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar perencanaan dan implementasi pembangunan dapat berjalan lancar. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, setiap pengelolaan alokasi dana desa yang telah diprogramkan perlu disertai dengan akuntabilitas atau pertanggung-jawaban yang terbuka dari pemerintahan desa kepada masyarakat, guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera (Wawancara: Aparatur Desa Lanting, 20 Mei 2024).

Permasalahan lainnya adalah program/kegiatan desa di beberapa desa dalam Kecamatan Teupah Tengah seperti yang terdapat di Desa Simpang Abail, Desa Busung Indah, Desa Lanting, Desa Kahad dan Desa Matanurung dikelola pada saat anggaran dana desa akan dicairkan. Namun dalam pengawasan yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Simeulue dan pihak kecamatan seperti Camat belum dilakukan secara optimal bahkan masih sangat kurang terlihat pengikutsertaan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa. Hal ini diperburuk masih minimnya pengetahuan

dan kemampuan berpartisipasi masyarakat dalam hal regulasi pengelolaan dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap partisipasi masyarakat, dengan judul penelitian **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan latar belakang dalam suatu penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya terkait dengan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis ialah manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggung-jawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran, sehingga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, khususnya di desa-desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue.

2. Bagi Masyarakat Desa

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat di desa-desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah, mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami serta berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terletak hanya pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yaitu di Desa Labuah, Nancawa, Abail, Simpang Abail, Busung Indah, Lanting, Kahad, Matanurung, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batu dan Situbuk.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam Pasal (1) ayat (1), menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa menggambarkan desa yang ideal sebagai desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sebagai subjek hukum, desa memiliki hak dan kewajiban atas aset dan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, Dana Desa, sebagai bagian dari pendapatan desa, merupakan milik desa, dan dengan demikian, prioritas penggunaannya menjadi kewenangan desa itu sendiri.

Desa, yang mencakup desa adat atau sebutan lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh, serta

memiliki norma sosial yang khas. Sebagai kawasan otonom, desa diberikan hak istimewa, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran desa, yang memungkinkan desa untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara mandiri (Iqsan, 2016).

2.1.1.2 Pengertian Dana Desa

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa dalam berbagai aspek sesuai dengan kewenangannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan disalurkan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang telah ada sebelumnya.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk desa-desa, yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diberikan kepada desa dan desa adat, yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat. Dana

tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan.

Kementerian Keuangan mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Manik (2019:33), Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditujukan khusus untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Sementara itu, Lili (2018) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang diterima oleh desa setiap tahunnya dari APBN, yang diberikan secara langsung melalui transfer APBD Kabupaten/Kota. Dana ini diperuntukkan untuk mendanai berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa adalah dana yang diterima oleh desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan sebagai sarana untuk

pengembangan desa, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa yang bersangkutan.

2.1.1.3 Sumber Dana Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, yang bertujuan untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa berasal dari tiga sumber utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini meliputi beberapa jenis, yaitu:

- a. Hasil usaha: termasuk pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan tanah kas desa.
- b. Hasil asset: pendapatan yang diperoleh dari pasar desa, tempat pemandian umum, dan irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, barang, atau jasa yang dihitung dengan nilai uang.
- d. Pendapatan lain-lain asli desa: termasuk hasil pungutan yang dikenakan oleh desa.

2. Transfer mencakup dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, serta bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan lain-lain, meliputi hibah dan pendapatan sah lainnya yang diterima oleh desa.

2.1.1.4 Tujuan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa menetapkan beberapa tujuan penggunaan dana desa, yaitu: (1) meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, (2) mengurangi angka kemiskinan, (3) mendorong perkembangan ekonomi desa, (4) mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan (5) memperkuat peran masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pembangunan. Sumber pendapatan desa sendiri terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari total Dana Transfer Daerah, yang disalurkan secara bertahap. Penghitungan dana desa dilakukan berdasarkan jumlah desa dan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: a) jumlah penduduk, b) tingkat kemiskinan, c) luas wilayah, dan d) kesulitan geografis. Penentuan dana desa dilakukan dengan menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut: 1. 90% porsi untuk alokasi dasar yang dibagikan secara merata, 2. 10% porsi untuk alokasi berbasis formula, yang rinciannya terdiri dari: a. jumlah penduduk desa (25%), b. tingkat kemiskinan

desa (35%), c. luas wilayah desa (10%), dan d. tingkat kesulitan geografis desa (30%).

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Adisasmita (2016:22) menyatakan bahwa pengelolaan bukan sekadar melaksanakan suatu kegiatan, melainkan serangkaian kegiatan yang mencakup berbagai fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:534), pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan pengelola yang melibatkan kegiatan tertentu dengan melibatkan orang lain, serta proses yang berfokus pada penyusunan kebijakan dan tujuan organisasi, sekaligus memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Balderton (dalam Adisasmita, 2016:21) menyatakan bahwa pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen, yaitu usaha untuk menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan tenaga manusia agar dapat memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif demi mencapai tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggung-jawaban keuangan desa. Dalam

upaya mewujudkan tata kelola yang baik pada sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta penerapan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dianggap transparan jika diterapkan prinsip keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat desa untuk memperoleh akses dan informasi terkait keuangan desa. Prinsip akuntabilitas mengharuskan penyampaian informasi keuangan serta keputusan-keputusan ekonomi, sosial, dan politik kepada masyarakat desa dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga mereka dapat mengevaluasi pertanggung-jawaban pemerintah desa atas setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan prinsip partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

Menurut Ribawanto dan Said (2015:84), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, antara lain:

1. Kurangnya keselarasan antara perencanaan yang dilakukan di tingkat desa dan kecamatan.
2. Terbatasnya jumlah dana desa yang dapat mendukung operasional administrasi pemerintah desa.
3. Rendahnya intensitas sosialisasi mengenai dana desa kepada masyarakat.

Sementara itu, implementasi pengelolaan keuangan desa oleh aparat pemerintah desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah terbatasnya anggaran serta keterbatasan sumber daya manusia, baik yang berasal dari masyarakat maupun perangkat desa itu sendiri.

2.1.2.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggung-jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola dengan berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, seperti yang diatur dalam Pasal 29, dilakukan berdasarkan prinsip kas. Prinsip kas yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pencatatan transaksi dana yang masuk dan keluar dari rekening kas desa.

Indikator Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang dianggarkan dalam APBDes.
- b. Sekretaris desa bertanggung jawab dalam koordinasi penyusunan rancangan APBDes, yang didasarkan pada RKPDes tahun tersebut serta pedoman penyusunan APBDes yang diatur oleh peraturan bupati/walikota setiap tahun.
- c. Materi yang harus tercantum dalam peraturan bupati/walikota mencakup setidaknya:
 - 1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa.
 - 2) Prinsip penyusunan APBDesa.
 - 3) Kebijakan penyusunan APBDesa.
 - 4) Teknik penyusunan APBDesa dan
 - 5) Hal khusus lainnya.
- d. Rancangan APBDes yang sudah disusun menjadi bahan untuk penyusunan peraturan desa tentang APBDesa.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa yang berada di bank yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
- b. Rekening kas desa ini dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- c. Untuk desa yang tidak memiliki layanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dapat dibuka di bank terdekat yang juga dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
- b. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum.
- c. Buku kas umum tersebut ditutup pada akhir setiap bulan.

4. Pelaporan

- a. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa untuk semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Laporan pelaksanaan APBDesa.
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.

- c. Kepala desa harus menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan yang dimaksud pada pasal 56, yang disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggung-jawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi APBDes kepada bupati/walikota melalui camat pada akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggung-jawaban harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan melalui peraturan desa.
- c. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan:
 - 1) Laporan keuangan, terdiri atas: Laporan realisasi APBDesa dan juga Catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
 - 3) Daftar program sectoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

2.1.3 Transparansi

2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Konsep transparansi dalam penelitian ini merujuk pada keterbukaan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pandangan beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut:

Lalolo (2019:13) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang memastikan setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pembuatan, serta hasil yang dicapai. Mustopa (2017:261) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diketahui oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat.

Kristianten (2016:45) mengungkapkan bahwa transparansi merujuk pada tindakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya, yaitu masyarakat. Kristianten (2016:31) juga menambahkan, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung-jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

2.1.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa menyebutkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi merujuk pada keterbukaan tanpa adanya penyembunyian informasi. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, moral, maupun hukum. Partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Sementara itu, tertib dan disiplin anggaran berarti pelaksanaan yang konsisten, tepat waktu, sesuai jumlah yang ditetapkan, dan mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku (DJBPD, 2016). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Menurut Sabarno (2017: 38) bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban

masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yang dikutip oleh Liong, dkk (2018), terdapat enam prinsip transparansi, yaitu:

1. Informasi yang disediakan harus mudah dipahami dan diakses, termasuk mengenai dana, cara pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya publikasi dan media yang menginformasikan proses kegiatan serta rincian keuangan.
3. Laporan berkala yang mencakup penggunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh publik.
4. Laporan tahunan yang tersedia untuk umum.
5. Website atau media publikasi organisasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
6. Pedoman yang jelas dalam penyebaran informasi.

Didjaja (2018:261) menyatakan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencakup lima hal penting dalam perencanaan pemerintah, yaitu:

1. Keterbukaan dalam rapat-rapat penting yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat.
2. Penyediaan informasi terkait dokumen yang perlu diketahui oleh publik.
3. Keterbukaan dalam prosedur, baik itu pengambilan keputusan maupun penyusunan rencana.
4. Keterbukaan dalam register yang berisi fakta hukum, seperti catatan sipil dan buku tanah.
5. Keterbukaan menerima partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

2.1.3.4 Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Kristianten (2016) menyebutkan beberapa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana transparansi dalam perencanaan dan penganggaran, antara lain:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus disusun dalam format yang mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Informasi yang disajikan harus jelas dan lengkap.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat harus terbuka dan jujur. Masyarakat berhak mengetahui secara lengkap mengenai pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, transparansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik.

3. Keterbukaan proses

Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai penggunaan dana desa untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait alokasi dan penggunaan dana desa.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Proses pembangunan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang kemudian dituangkan dalam dokumen resmi desa. Regulasi ini menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengelolaan dana desa yang transparan.

5. Mekanisme Pengaduan

Mekanisme pengaduan merupakan indikator transparansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti adanya penyediaan kotak saran dan sms center sebagai sarana pengaduan tidak langsung. Sedangkan untuk pengaduan secara langsung pihak instansi pelayanan terpadu telah membentuk bagian khusus yang menangani permasalahan keluhan/pengaduan yaitu Bidang Pengaduan. Akan tetapi mekanisme pengaduan ini belum sepenuhnya berjalan, karena bidang pelayanan hanya mengelola pengaduan yang dilakukan secara langsung yang dilakukan dengan cara menyelesaikan permasalahan secara langsung ketika ada yang datang mengadu terkait soal pelayanan. Sedangkan untuk kotak saran dan sms center belum tersedia disana, (Irawan, A 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator-indikator yang dijadikan fokus dalam penelitian ini antara lain mencakup keterbukaan informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, publikasi mengenai rincian keuangan Dana Alokasi Desa, serta laporan berkala yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Dalam penelitian ini, konsep akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dengan

kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Konsep ini didasarkan pada pandangan beberapa ahli. Syahrudin (2017:65) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan penjelasan kepada otoritas yang lebih tinggi mengenai tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi terhadap masyarakat luas.

Menurut Hadi (2016), akuntabilitas berarti bahwa pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik (masyarakat umum) dan pihak yang memiliki kepentingan. Sementara itu, Hartono (2023:23) menyatakan bahwa asas akuntabilitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2019), terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal merujuk pada pertanggung-jawaban bawahan kepada atasan, atau bentuk tanggung jawab suatu jabatan kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya adalah kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, atau yang lebih sederhana yakni tanggung jawab dosen kepada kepala masing-masing ketua prodi, dan juga seterusnya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung-jawaban yang diberikan secara menyeluruh kepada publik, umum, atau terhadap lembaga lain yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Kedua jenis ini memiliki perbedaan yang jelas. Akuntabilitas vertikal fokus pada hubungan antara pejabat dengan atasan, seperti kepala desa yang harus melaporkan kinerjanya kepada bupati/walikota, hingga kepada presiden sebagai pemimpin puncak. Sementara itu, akuntabilitas horizontal berfokus pada pertanggung-jawaban antar lembaga yang sejajar, tanpa adanya hubungan atasan dan bawahan, seperti halnya pemerintah desa yang melaporkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat di desa tersebut.

2.1.4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan atau pertanggung-jawaban terkait kinerja dan tindakan seseorang, badan, lembaga, atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk menerima keterangan atau pertanggung-jawaban tersebut (Syamsidar dkk, 2018:96). Mardiasmo (2014:20) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk melaporkan, mengungkapkan, dan memberikan pertanggung-jawaban atas semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah, yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta penjelasan tersebut. Setiawan dkk.

(2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas mencakup pemberian informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus bertindak sebagai pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, seperti hak untuk mengetahui, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk menyuarakan aspirasi. Sebab, pada dasarnya, akuntabilitas merupakan tujuan utama dari pelaporan keuangan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjelaskan serta menerangkan kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan atau pertanggung-jawaban tersebut.

Krina (2013:10) menyimpulkan bahwa akuntabilitas pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban institusi pemerintahan dan aparat yang bekerja di dalamnya untuk mengambil kebijakan atau melaksanakan tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Kristianten, 2016). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntansi vertikal) dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas (akuntansi horizontal).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

2.1.4.4 Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mahmudi (2017:44-46) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merujuk pada kewajiban lembaga publik untuk bertindak dengan jujur dalam menjalankan tugasnya serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan sumber daya dan publikasi informasi harus dilakukan secara sah dan telah memperoleh izin yang sesuai.

2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggung-jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*Performance Accountabillity*). Inefisiensi organisasi publik adalah

menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu, mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung-jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*Stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dampak (Negative) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial mengacu pada tanggung jawab lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif,

tanpa adanya pemborosan, kebocoran dana, atau korupsi. Fokus utama akuntabilitas finansial adalah pada pengelolaan anggaran dan keuangan. Dimensi ini sangat penting karena pengelolaan keuangan publik sering menjadi perhatian utama masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki dimensi-dimensi dengan tujuan tertentu, salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran. Dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntabilitas dijalankan secara benar, dengan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan mematuhi hukum yang berlaku, yang menjadi suatu kewajiban.

2.1.4.5 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Amir (2019:85) menjelaskan beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

1. Efisien

Efisien merupakan salah satu ukuran untuk membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan menggunakan input yang terlaksana.

2. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyajikan gambaran tentang seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas dan waktu.

3. Produktif

Produktif merupakan kemampuan dalam memanfaatkan waktu untuk menghasilkan laporan pengelolaan yang akurat dan tepat. Maka dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara produktif.

4. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah Desa pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif fungsional akuntabilitas, maka baru tahap *probity and legality accountability (compliance)* yang dipenuhi. Di sini tampak bahwa jika Indonesia hanya menerapkan pertanggung jawaban anggaran belanja dan pendapatan daerah atau negara, maka dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan Desa di Indonesia baru sebatas tahap kepatuhan atau *compliance*, (Abadi dkk, 2020).

5. Pelaporan Pengukuran Kerja

Service accomplishment diartikan sebagai prestasi dari program tertentu. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (*explanatory information*). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut. Pembandingan *service efforts* dengan *service accomplishment* merupakan dasar penilaian efisiensi operasi pemerintah Desa, (Abadi dkk, 2020).

Sedangkan menurut Mahmudi (2017:9) menjelaskan indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu patuh terhadap prosedur. Patuh pada prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang sama.

Adapun Menurut Resti (2015) menyatakan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi, yaitu transparansi merupakan keterbukaan pertanggungjawaban dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggungjawab dan untuk memerangi korupsi. Bila anggaran dan laporan keuangan dapat diperiksa oleh siapa saja, maka semuanya akan terlihat transparansi.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merujuk pada proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut. Partisipasi adalah elemen yang sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015: 68). Selain itu, Adisasmita (2016: 34) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, yang mencakup kegiatan

dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilakukan di tingkat lokal.

Menurut Mikkelen yang dikutip oleh Sujana dkk (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat didalam sebuah kegiatan, baik kegiatan pembangunan, maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dilingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Atiningsih, dkk (2019) menjelaskan definisi tentang partisipasi masyarakat merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam program-program yang melibatkan masyarakat pedesaan seperti program pembangunan ataupun program pengembangan di desa tersebut.

Adapun menurut Arindya (2019:119) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang berada di masyarakat, memilih dan mengambil suatu keputusan secara alternatif dengan memberi solusi untuk menangani suatu masalah dalam sebuah pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah dan keterlibatan dalam proses evaluasi suatu perubahan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan ataupun pengembangan, kegiatan memecahkan solusi memecahkan masalah yang ada, dan mengevaluasi suatu permasalahan yang terjadi.

2.1.5.2 Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Menurut Wardiyanto (2016:134) indikator dalam partisipasi masyarakat adalah menyampaikan pendapat, yaitu pendapat merupakan pandangan seseorang

terhadap suatu kebenaran yang relatif, karena mempengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian ataupun saran. Menyampaikan pendapat dalam hal partisipasi masyarakat adalah suatu keharusan agar masyarakat ikut serta dalam segala hal yang dilakukan dalam menentukan Keputusan.

Sedangkan Menurut Arindya (2019:120) menjelaskan bahwa indikator partisipasi masyarakat yaitu sebagai penentu keputusan yang merupakan sebuah akhir dari proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk poin sebagai penentu keputusan. Adapun menurut Heler yang dikutip oleh Atiningsih, dkk (2019) menjelaskan bahwa indikator partisipasi masyarakat adalah:

1. Terlibat dalam melaporkan

Masyarakat harus terlibat dalam melaporkan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, laporan yang dimaksud adalah berjalannya kegiatan yang direncanakan jika ada kendala masyarakat berhak untuk melaporkan kepada yang bersangkutan.

2. Terlibat dalam mengawasi

Masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan dana desa agar dana desa dapat dipergunakan pada tempatnya dan tidak diselewengkan dan di korupsi oleh pemerintah desa, maka dari itu masyarakat wajib membentuk paguyuban-paguyuban untuk mengontrol dan mengawasi para kepala desa.

3. Terlibat dalam kegiatan musyawarah desa

Kegiatan musyawarah desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk media pertukaran ide, informasi dan aspirasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa, sehingga penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

4. Keterlibatan Perencanaan Partisipatif

Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa, mulai dari musyawarah desa hingga penyusunan rencana kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa. Partisipasi ini memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat dapat tercermin dalam program yang dijalankan, (Mustanir, 2016).

5. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengikuti program pemberdayaan yang dibiayai oleh Dana Desa, seperti pelatihan keterampilan, kursus, atau kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka, (Mustanir, 2016).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai acuan dan pembanding dalam melaksanakan penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang juga disajikan dalam bentuk tabel:

Penelitian Sukmawati (2019) berjudul “Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)”. Hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang pengaruh akuntabilitas serta partisipasi anggota menunjukkan hubungan yang berpengaruh secara signifikan.

Penelitian Putra, I Made Yoga Darma dan Rasmini (2019) berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung.

Penelitian Dewi dan Adi Priyo (2019) berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”. Desa Candirejo telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan melalui penerapan akuntabilitas, yang tercermin dalam pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini juga didukung oleh adanya laporan rutin terkait pengelolaan dana desa serta publikasi informasi keuangan desa. Pemasangan spanduk dan pengumuman yang disampaikan saat musyawarah desa mengenai rincian dana desa menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan dengan baik di Desa Candirejo.

Penelitian Ultafiah, Weny (2017) berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. sedangkan variabel partisipasi secara parsial tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Merapi Barat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut) Sukmawati, Fitri (2019)	Pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi	Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengetahuan dewan mengenai akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan, serta partisipasi anggota juga terbukti memiliki hubungan yang berpengaruh secara signifikan.	Transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa	Partisipasi masyarakat
2.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Putra, I Made Yoga Darma dan Rasmini (2019)	Pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif	Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pemerintahan desa, semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan dana desa. Transparansi juga memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah tersebut, yang berarti bahwa semakin baik transparansi dalam pemerintahan desa, semakin besar kemungkinan peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal, yang menunjukkan bahwa semakin aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa, semakin besar potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.	Transparansi, akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat	Kajian sebelumnya melihat efektivitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kajian ini fokus pada pengelolaan dana desa

Tabel 2.1
Lanjutan

3.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Dewi dan Adi Priyo (2019)	Pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi	Desa Candirejo telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terlihat dari pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh adanya laporan rutin tentang pengelolaan dana desa serta publikasi informasi terkait, yang disampaikan melalui pemasangan spanduk dan pengumuman pada saat musyawarah desa. bentuk pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi.	Transparansi , akuntabilitas dan partisipasi masyarakat	Kajian sebelumnya menjadikan pembangunan desa sebagai variabel dependen. Sedangkan kajian ini fokus pada pengelolaan dana desa
4.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Ultafiah, Weny (2017)	Pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana desa. Sementara itu, variabel partisipasi secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang mendukung penerapan <i>Good Governance</i> di desa-desa Kecamatan Merapi Barat.	Transparansi , akuntabilitas dan partisipasi masyarakat	Kajian sebelumnya menjadikan pengelolaan dana desa <i>Good Governance</i> sebagai variabel dependen. Sedangkan kajian ini fokus pengelolaan dana desa

Sumber: diolah 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting. Kerangka pemikiran juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian.

2.3.1 Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Dana Desa

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga jika masyarakat memerlukan informasi tersebut, mereka dapat mengaksesnya dengan mudah. Dengan adanya keterbukaan ini, pengelolaan dana

desa dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif oleh pihak yang berwenang. Hal ini memastikan bahwa dana desa, yang digunakan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat, dapat tersalurkan dengan tepat (Ardiyanti, 2019). Putra, I Made Yoga Darma dan Rasmini (2019) dalam penelitiannya menunjukkan transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Yohanes dkk (2019) yang menunjukkan yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Salah satu unsur utama dalam pengelolaan dana desa yang baik adalah dengan adanya transparansi, mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Adanya transparansi atau keterbukaan terkait manajemen serta laporan keuangan desa, pemerintah, serta aparat desa akan memperoleh legalitas warga masyarakat serta kepercayaan khalayak.

2.3.2 Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks ini, akuntabilitas publik berarti kewajiban pihak yang dipercaya (agen) untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang menjadi

tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Mahmudi, 2017: 9). Akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban agen (perangkat desa) atas penyelenggaraan pemerintahan desa kepada principal (masyarakat desa). Oleh karena itu, semakin baik akuntabilitas yang diterapkan dalam suatu kegiatan, semakin efektif pengelolaan dana desa yang dapat dicapai (Putra dan Rasmini, 2019). Penelitian oleh Ultafiah dan Weny (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pertiwi (2015) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa artinya semakin tinggi akuntabilitas anggaran maka akan meningkatkan kualitas pengeklaan anggaran dan sebaliknya. Setiap pelaksanaan anggaran memerlukan pertanggung-jawaban dan terbuka untuk diperiksa guna menjamin efisiensi dan efektivitas suatu anggaran. Akan tetapi bereda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) dimana akuntabilitias tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketidak adanya pengaruh tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu system akuntansi dan system anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil manfaat yang akan dicapai.

2.3.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi merujuk pada hak setiap individu atau warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tersebut. Dengan adanya partisipasi, jika terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, yang pada gilirannya membantu menciptakan pengelolaan yang lebih terarah. Penelitian oleh Ultafiah dan Weny (2017) menunjukkan bahwa partisipasi, secara terpisah, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

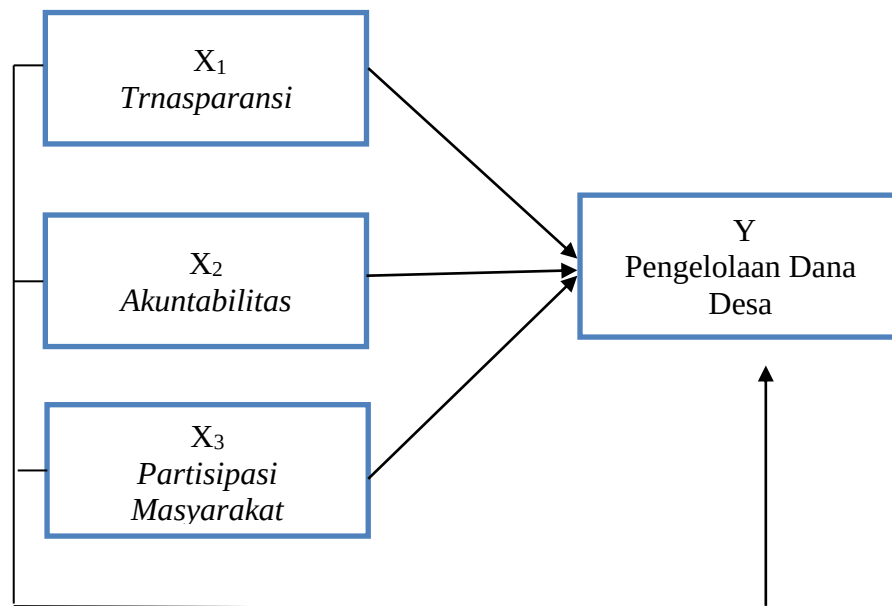
2.3.4 Hubungan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dengan Pengelolaan Dana Desa

Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan penerapan ketiga prinsip ini, penyelewengan dan pemborosan dana desa dapat diminimalisir, karena proses pengelolaan dana desa dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengharapkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan good governance (Puji dan Yulianto, 2016). Penelitian oleh Ultafiah dan Weny (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan variabel partisipasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa secara parsial.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiviasuti (2022) yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Penelitian Ulfiah (2017) juga menyatakan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa. Maka Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabilitas, maka dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan yaitu mengestimasi pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan dan akuntabilitas apabila dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas- luasnya, sedangkan dikatakan akuntabilitas apabila pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangannya baik secara moral maupun administrasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel di atas, maka kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan secara visual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas maka dapat dijelaskan bahwa kajian ini mengangkat tiga variabel independent yakni transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3) sedangkan variabel dependen satu yakni pengelolaan dana desa (Y). Berbagai variabel tersebut akan dilihat pengaruhnya secara parsial masing-masing variabel X terhadap Y dan secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y .

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif (H_a). Penolakan atau penerimaan hipotesis tergantung pada hasil penelitian terhadap fakta-fakta. Oleh sebab itu hipotesis merupakan suatu teori sementara yang kebenarannya masih di uji. Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H_2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H_3 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H_4 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan desain penelitian yang merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Desain penelitian mengacu pada jenis atau macam penelitian yang dipilih untuk mencapai tujuan penelitian, serta berperan sebagai alat dan pedoman untuk mencapai tujuan tersebut. Desain penelitian membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban dari penelitian dengan sah, objektif, akurat serta hemat.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada kategori penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkat (*skoring*) (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian ini adalah kausalitas. Sugiyono (2019) menyebutkan penelitian kausal adalah penelitian yang rumusan masalah penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional* dengan periode pengamatan tahun 2023-2024. Studi yang

mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan disebut studi dengan horizon waktu *one shot* atau *cross sectional* (Sekaran & Bougie, 2017:77). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam kajian ini berupa hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil pengisian kuesioner.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Siagian (2015:14) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisa dan kemudian diambil kesimpulannya. Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yang berjumlah 12 Desa yaitu Desa Labuah, Desa Nancawa, Desa Abail, Desa Simpang Abail, Desa Busung Indah, Desa lanting, Desa kahad, Desa Matanurung, Desa Lasikin, Desa Sua-Sua, Desa Batu-Batu dan Desa Situbuk.’

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Sampel ini merupakan contoh yang mewakili keseluruhan populasi, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel akan mencerminkan kondisi seluruh individu dalam populasi tersebut, karena sampel memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Menurut Gay dan Diehl dalam (Indrawan dan Yaniawati, 2014:102), untuk penelitian korelasional, jumlah sampel minimal adalah 30 subjek. Sementara itu, menurut Roscoe, ukuran sampel yang tepat untuk kebanyakan penelitian adalah lebih dari 30 namun kurang dari 500. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari 96 responden yang berasal dari 12 desa di Kecamatan Teupah Tengah, yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam penelitian. Responden terdiri dari 60 anggota PPKD yang ada di setiap desanya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta 36 tokoh masyarakat setempat. Seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No	Populasi (Desa)	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kaur perencanaan	Kasi Pembangunan	Kasi Pelayanan	Masyarakat
1	Labuah	1	1	1	1	1	3
2	Nancawa	1	1	1	1	1	3
3	Abail	1	1	1	1	1	3
4	Simpang Abail	1	1	1	1	1	3
5	Busung Indah	1	1	1	1	1	3
6	Lanting	1	1	1	1	1	3
7	Kahad	1	1	1	1	1	3
8	Matanurung	1	1	1	1	1	3
9	Lasikin	1	1	1	1	1	3
10	Sua-Sua	1	1	1	1	1	3
11	Batu-Batu	1	1	1	1	1	3
12	Situbuk	1	1	1	1	1	3
Jumlah		12	12	12	12	12	36
Total		96					

Sumber: diolah 2024

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Oleh karena itu, pengumpulan data harus memperhatikan siapa yang menjadi objek utama dalam penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer menjadi bagian penting dalam proses penelitian ekonomi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan (Muhammad, 2008). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui distribusi kuesioner kepada aparat desa dan masyarakat setempat.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Data utama yang diperoleh berasal dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 96 responden, yang bertujuan untuk mengukur fokus kajian ini. Sesuai dengan pengertian angket menurut Arikunto (2018), angket adalah “sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan tertulis yang dapat dijawab langsung oleh responden.” Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup dengan skala Likert, di mana responden hanya perlu memilih salah satu dari pilihan jawaban yang telah disediakan, sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil yang diperoleh.

Tabel 3.2
Skala Penilaian Jawaban Angket

Alternative jawaban	Bobot nilai
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2019)

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019), variabel penelitian adalah “segala hal yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan sumber informasi, sehingga dari situ dapat diambil kesimpulan.” Variabel menjadi fokus utama dalam penelitian kuantitatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Definisi dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur	Item
1.	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN, yang kemudian disalurkan ke masing-masing desa. Selanjutnya, penggunaan dana tersebut akan diawasi dan dipertanggungjawabkan (Lili, 2018).	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung-jawaban (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)	Likert	A1 – A5
2.	Trnasparansi (X1)	Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara menyeluruh mengenai keuangan daerah (Rahman, Suwandi, dan Hamid, 2015).	1. Kesiadaan dan aksesibilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten, 2016). 5. Mekanisme Pengaduan (Irawan, 2018).	Likert	B1 – B4

Tabel 3.1 Lanjutan

3.	Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018).	1. Efisien 2. Efektivitas 3. Produktif (Amir, 2019) 4. Pelaporan Keuangan 5. Pelaporan Kinerja (Abadi dkk, 2020)	Likert	C1 – C3
4	Partisipasi (X3)	partisipasi masyarakat merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam program-program yang melibatkan masyarakat pedesaan seperti program pembangunan ataupun program pengembangan di desa tersebut. (Atiningsih, dkk, 2019)	1. Terlibat dalam pelaporan 2. Terlibat dalam mengawasi 3. Terlibat dalam kegiatan musyawarah des Atiningsih, dkk (2019) 4. Perencanaan Partisipatif 5. Pemberdayaan Masyarakat (Mustanir, A. 2016)	Likert	D1 – D3

Sumber: diolah 2024

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini, menggunakan persamaan regresi linear berganda (*multiple linear regresion*) karena variabel bebas dalam penelitian lebih dari satu. Saat menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan *software Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 26.0. Adapun persamaan regresi linear berganda menurut Sugiyono (2019). Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

X₁ = Transparansi Pengelolaan Dana Desa

X₂ = Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa

X_3 = Partisipasi Masyarakat
 e = *error term* (tingkat kesalahan).

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pengujian Validitas

Validitas merujuk pada sejauh mana suatu alat ukur (seperti kuesioner) dapat mengukur dengan tepat apa yang ingin diukur oleh peneliti. Oleh karena itu, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah jika koefisien korelasi (r) mencapai nilai minimal 0,3. Artinya, jika korelasi antara butir pertanyaan dan skor total kurang dari 0,3, maka butir tersebut dianggap "Tidak Valid".

2. Pengujian Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten jika diulang (Sudjana, 2005). Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus alpha Cronbach. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen yang digunakan dapat dianggap reliabel.

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini menggunakan 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedestitas dan uji autokorelasi.

1. Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov*, menurut Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significanted*), yaitu:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dalam analisis regresi berganda yang melibatkan dua atau lebih variabel independen ($X_{1,2,3,...,n}$). Tujuan dari uji ini adalah untuk mengukur sejauh mana hubungan antar variabel independen tersebut, yang diindikasikan dengan koefisien korelasi (r). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Tolerance value $< 0,10$ atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.
- b. Tolerance value $> 0,10$ atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:120), pengujian heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED yaitu ada atau tidaknya pola tertentu. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137-138).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali, 2018: 121). Uji autokorelasi juga berkaitan dengan pengaruh data atau pengamat dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain (Gani dan Amalia, 2015:124). Nilai suatu data sering kali dipengaruhi atau terkait dengan data lainnya. Dalam regresi klasik, variabel-variabel tidak boleh mengalami autokorelasi. Jika autokorelasi terjadi, model regresi akan menjadi tidak valid, karena menghasilkan parameter yang tidak logis dan tidak masuk akal. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series, karena data tersebut terikat oleh waktu, berbeda dengan data cross section yang tidak terikat oleh waktu.

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin Watson*.

Kriteria dalam pengujian Durbin Watson yaitu (Sujarweni, 2016: 232) :

- a. Jika $0 < d < d_L$, berarti ada autokorelasi positif
- b. Jika $4 - d_L < d < 4$, berarti ada auto korelasi negative

- c. Jika $2 < d < 4 - dU$ atau $dU < d < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
- d. Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$, pengujian tidak meyakinkan.
- e. Jika nilai $du < d < 4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Dengan hipotesis dasar di atas, maka dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Run test adalah:

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak random (sistematis).
- b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t tabel dan t hitung. Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05 (Sugiyono, 2019). Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Untuk pengujian pengaruh parsial, digunakan uji signifikansi terhadap hipotesis yang ditentukan melalui uji t dengan pengujian sebagai berikut:

H_0 : nilai probabilitas $t > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak.

Artinya variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: nilai probabilitas $t < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah pengaruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan Uji F adalah:

1. Jika nilai sig. $< 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini menyatakan bahwa semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig. $> 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi r^2

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R semakin mendekati 1, menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R semakin mendekati 0, maka berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

Kecamatan Teupah Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Simeulue. Ibu kota Kecamatan ini adalah Lasikin, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Kecamatan Teupah Tengah memiliki luas 83,659 Km² yang terdapat dua wilayah Mukim yaitu: Mukim Delog Kulungan dan mukim Delog Antengan. Wilayah Kecamatan Teupah Tengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Hindia
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur dan Teupah Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teupah Barat.

Menurut Topografi wilayah Desa yang ada dalam Kecamatan Teupah Tengah rata-rata terletak di dataran, hanya ada dua Desa yang terletak di lereng atau punggung bukit yaitu Desa Kahad dan Desa Nancawa, sedangkan yang terletak di daerah lembah atau sering disebut dengan daerah aliran sungai ialah Desa Abail.

Kecamatan Teupah Tengah memiliki 12 Desa yang terbagi ke dalam 2 mukim yaitu, kemukiman Delog Kulungan yang membawahi 5 Desa dan kemukiman Delog Antengan yang membawahi 7 Desa. Jumlah Penduduk

Kecamatan Teupah Tengah pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6.622 jiwa yang terdiri dari 3.355 jiwa penduduk laki-laki dan 3.267 jiwa penduduk perempuan. Di lihat dari rasio jenis kelamin jumlah jiwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Teupah Tengah mencapai 50 jiwa per Km dengan luas wilayah 83,659 Km² jumlah rumah tangga di Kecamatan Teupah Tengah mencapai 1.877 dengan rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa.

Dilihat secara garis besar mata pencaharian masyarakat Teupah Tengah adalah petani dan nelayan, dengan lahan yang sangat luas sehingga memudahkan sebagian masyarakat setempat untuk bercocok tanam begitu pula dengan laut yang sangat luas sehingga dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk mencari rezeki, tetapi ada juga sebagai pegawai negeri, pedagang, pekebun, dan buruh.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Deskripsi Variabel Transparansi

Variabel transparansi ini terdiri dari tiga pertanyaan dengan tingkat persetujuan responden pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Deskripsi Variabel Transparansi

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban					Mean
		SS	S	CS	TS	STS	
1	Dana desa yang realisasikan tersedia dokumen rincian antara anggran masuk dan keluar	10	21	40	15	10	3,06
2	Setiap Pembangunan dana desa selalu diberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat	7	29	43	10	7	3,19
3	Tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban dana	5	28	42	13	8	3,09

	desa selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat						
4	Pengelolaan dana desa direalisasikan berdasarkan peraturan desa yang sudah disepakati	8	31	38	11	8	3,20
5	Dana desa dikelola dan disalurkan setelah memberikan informasi dan persetujuan masyarakat banyak	17	32	29	15	3	3,46
Total Rata-Rata							3,20

Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel transparansi tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,20.

4.2.2 Deskripsi Variabel Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas ini terdiri dari lima pertanyaan dengan tingkat persetujuan responden pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Deskripsi Variabel Akuntabilitas

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban					Mean
		SS	S	CS	TS	STS	
1	Dana desa yang diterima setiap tahunnya sudah direalisasikan dengan efisien	17	29	30	12	8	3,36
2	Realisasi dana desa sudah efektif dalam berbagai bidang Pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur	18	25	26	16	11	3,23
3	Dana desa yang dikelola sudah produktif dalam memberikan dampak baik bagi masyarakat	18	31	29	10	8	3,42
4	Dana desa yang direalisasikan sesuai dengan dana desa yang diterima dari pemerintah	19	30	25	13	9	3,38
5	Dana desa yang dikelola dan disalurkan dalam berbagai aspek sesuai kebutuhan masyarakat	16	27	32	12	9	3,30
Total Rata-Rata							3,34

Berdasarkan tabel 4.2, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,34.

4.2.3 Deskripsi Variabel Partisipasi

Variabel partisipasi ini terdiri dari lima pertanyaan dengan tingkat persetujuan responden pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Deskripsi Variabel Partisipasi

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban					Mean
		SS	S	CS	TS	STS	
1	Pengelolaan dana desa melibatkan aparatur desa dan masyarakat	11	28	33	15	9	3,17
2	Setiap elemen dilibatkan dalam mengawasi pengelolaan dana desa	12	24	32	19	9	3,11
3	Musyawaran terkait pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan akuntabilitas	10	27	42	14	8	3,33
4	Masyarakat dalam pengelolaan dana desa diberikan kesempatan untuk berperan di lapangan	8	24	42	14	8	3,10
5	Partisipasi masyarakat juga dilibatkan dalam memanfaatkan dana desa seperti kegiatan pemberdayaan UMKM, Pembangunan dan peningkatan SDM	7	21	45	17	6	3,06
Total Rata-Rata							3,15

Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel partisipasi tergolong cukup baik dengan nilai rata-rata 3,15.

4.2.4 Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa

Variabel pengelolaan dana desa ini terdiri dari lima pertanyaan dengan tingkat persetujuan responden pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban					Mean
		SS	S	CS	TS	STS	
1	Dana desa dalam pengelolaannya sudah dirancang perencanaan dengan sangat baik oleh pihak pengelola	16	27	35	14	4	3,38
2	Setiap aspek pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa sudah bersesuaian dengan perencanaan sebelumnya	19	33	31	11	2	3,58
3	Realisasi dana desa sudah tertata dengan baik dan transparan	13	27	40	14	2	3,36
4	Setiap tahapan pengelolaan dana desa dilaporkan kepada masyarakat melalui musyawarah dan mupakat	16	31	37	12	0	3,53
5	Realisasi dana desa selalu adanya pertanggung-jawaban dari pihak pengelola	16	27	38	13	2	3,43
Total Rata-Rata							3,46

Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,46.

4.3 Karakteristik Responden

4.3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada bagian ini responden dibagi berdasarkan jenis kelamin.

Pembagiannya dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Perempuan	41	43%
2	Laki-laki	55	57%
Total Responden		96	100 %

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 96 (100%) responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 55 orang (57%) hal ini dikarenakan selama penelitian peneliti banyak menjumpai kalangan laki yang menjadi aparatur desa. Kemudian jumlah responden perempuan sebanyak 41 orang (43%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang menjadi sampel ialah adalah laki-laki.

4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tingkat usia seseorang dapat menunjukkan tingkat kematangan seorang sehingga dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut dalam memberikan tanggapan. Salah satunya adalah terkait pengelolaan dana desa. Pembagian kelompok usia responden dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	< 20 Tahun	1	1%
2	20 – 29 Tahun	67	72%
3	30 – 39 tahun	11	12%
4	40 – 49 Tahun	12	12%
	> 50 Tahun	5	5%
Total		96	100 %

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 96 (100%) responden yang terpilih, didominasi oleh responden pada kelompok usia 20 – 29 tahun dengan jumlah responden sebanyak 67 orang (72%). Hal ini dikarenakan rata-rata responden yang peneliti jumpai kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang berusia antara 20 – 29 tahun dan sebagian sudah berkeluarga, namun ada juga yang belum

bekeluarga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparatur desa dan masyarakat yang menjadi sampel adalah dari kelompok usia 20 - 29 tahun.

4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang juga dapat menunjukkan tingkat kematangan seorang sehingga dapat mempengaruhi penilaian seseorang tersebut terhadap kebijakan termasuk pengelolaan dana desa. Pembagian kelompok pendidikan responden di desa dalam Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Kategori Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA/Sederajat	22	22%
2	DIPLOMA III	13	14%
3	S1	44	46%
4	S2	9	9%
5	Lainnya	8	8%
Total		96	100 %

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang tingkat pendidikan terakhirnya ialah S1 dengan jumlah responden 44 orang (36%), kemudian diikuti oleh responden yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA dengan jumlah responden masing-masing 21 orang (22%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat dan aparatur desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue adalah tamatan S1.

4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan juga menjadi bagian dari aspek yang menenukan tanggapan responden terhadap kebijakan pengelolaan dana desa. Pembagian kelompok responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Kategori Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Karyawan/Buruh	27	29%
2	PNS/Honorer	32	34%
3	Wirausaha	22	23%
4	Pelajar	12	13%
5	Lainnya...	3	3%
Total		96	100 %

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS/Honorer dengan jumlah responden 32 orang (34%), kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani atau karyawan buruh dengan jumlah responden 22 orang (23%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat dan aparatur desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yang adalah bekerja tetap sebagai honorer, petani dan wirausaha pedagang dan buruh.

4.4 Hasil Pengujian Data

4.4.1 Pengujian Instrumen

Pengujian instrument dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Data validitas ini diperoleh dari 96 responden yang dijadikan sampel dalam hal uji kualitas data, guna mendapatkan kelayakan instrumen penelitian yang akan

digunakan. Untuk menentukan nilai validitas, maka digunakan rumus $n - 2$ atau $96 - 2 = 94$. Angka 94 inilah kemudian dilihat nilai r_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05. Adapun hasil uji validitas setiap item dapat dilihat Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Uji Validitas

Variabel		r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
Transparan (X1)	P1	0,722	0,200	Valid
	P2	0,867	0,200	Valid
	P3	0,868	0,200	Valid
	P4	0,901	0,200	Valid
	P5	0,803	0,200	Valid
Akuntabilitas (X2)	P1	0,726	0,200	Valid
	P2	0,875	0,200	Valid
	P3	0,856	0,200	Valid
	P4	0,866	0,200	Valid
	P5	0,797	0,200	Valid
Partisipasi (X3)	P1	0,761	0,200	Valid
	P2	0,863	0,200	Valid
	P3	0,809	0,200	Valid
	P4	0,845	0,200	Valid
	P5	0,716	0,200	Valid
Pengelolaan Dana Desa (Y)	PDD1	0,615	0,200	Valid
	PDD2	0,909	0,200	Valid
	PDS3	0,910	0,200	Valid
	PDD4	0,929	0,200	Valid
	PDD5	0,911	0,200	Valid

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dinyatakan valid, karena mempunyai koefisien korelasi di atas dari nilai kritis korelasi yaitu sebesar 0,200 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam. Selanjutnya, hasil pengujian instrument penelitian dari segi reliabilitas *item-total statistics* terhadap 96 responden. Output hasil dari uji reliabilitas menggunakan program *SPSS Statistic 26.0* ringkasan dari hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Variable	Cronbach's Alpha	N of Items
Transparansi	0,886	5
Akuntabilitas	0,883	5
Partisipasi	0,858	5
Pengelolaan Dana Desa	0,903	5

Hasil perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan software SPSS dapat dilihat pada *Cronbach's Alpha*. Data dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

4.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kernormalan distribusinya. Tentunya kita juga sudah tahu, kalau data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Normalitas K-S:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.11
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.93134661
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.040
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128 ^c

Sumber: Output SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel penelitian *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogorov-smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

5.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas) dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) Melihat nilai korelasi antar variabel independent. (2) Melihat nilai *condition index* dan *eigenvalue*. (3) Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflating factor* (VIF). Dalam kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara melakukan uji

multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF menggunakan program SPSS versi 26.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas (*Tolerance* dan VIF) Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap uji statistik yang dilakukan pasti ada dasar pengambilan keputusannya. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dengan *Tolerance* dan VIF adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai VIF < 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai VIF > 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.12
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.305	1.360		3.166	.002		
	Transparansi	.362	.090	.369	4.009	.000	.626	1.597
	Akuntabilitas	.179	.076	.211	2.350	.021	.661	1.514
	Partisipasi	.269	.096	.274	2.789	.006	.548	1.825

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini, dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan tabel output "*Coefficients*" pada bagian "*Collinearity Statistics*" diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel (X₁) sebesar 0,626, variabel (X₂) sebesar 0,661 dan variabel (X₃) sebesar 0,548 lebih besar dari 0,10. Sementara, nilai VIF untuk variabel (X₁) sebesar 1,597, variabel (X₂) sebesar 1,514 dan variabel (X₃) sebesar 1,825 lebih kecil dari 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

5.4.2.3 Uji Autokorelasi

Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya terjadi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin Watson sebagai mana perolehan pada Tabel 4.13 di bawah ini.

Tabel 4.13
Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.715 ^a	.512	.496	2.979	2.251
a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi					
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa					

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,272 sedangkan angka dU dari $96 - 3 = 93$ diperoleh sebesar 1,400, maka hasil dU < 2,251 sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi.

5.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali: 2016).

Gambar uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada bagian lampiran 6. Dari gambar tersebut bisa melihat hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot* telah memenuhi syarat heteroskedastisitas karena pada grafik *scatterplot* diatas titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu dan tidak teratur,

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas atau bebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji bertujuan menunjukkan terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas antar variabel. Pengambilan keputusan membandingkan nilai sigfikansi harus lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan data antar variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan data yang diotput dalam SPSS dengan model analisis regresi linier berganda didapatkan hasil pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.305	1.360		3.166	.002		
	Transparansi	.362	.090	.369	4.009	.000	.626	1.597
	Akuntabilitas	.179	.076	.211	2.350	.021	.661	1.514
	Partisipasi	.269	.096	.274	2.789	.006	.548	1.825

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.14, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,305 + 0,362 X_1 + 0,179 X_2 + 0,269 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan bahwa:

1. Koefisien regresi X_1 , yang diperoleh dari nilai (b_1) yaitu sebesar 0,362 atau 36,2% bernilai positif. Yang artinya apabila variabel transparansi mengalami peningkatan sebesar 1 maka semakin meningkat pengelolaan dana desa sebesar 0,362.

2. Koefisien regresi X_2 , yang diperoleh dari nilai (b_2) yaitu sebesar 0,179 atau 17,9% bernilai positif. Yang artinya apabila variabel akuntabilitas mengalami peningkatan sebesar 1 maka semakin meningkat pengelolaan dana desa sebesar 0,179.
3. Koefisien regresi X_3 , yang diperoleh dari nilai (b_3) yaitu sebesar 0,269 atau 26,9% bernilai positif. Yang artinya apabila variabel partisipasi mengalami peningkatan sebesar 1 maka semakin meningkat pengelolaan dana desa sebesar 0,269.

4.6 Uji Hipotesis Penelitian

4.6.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear multiples (berganda). Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y). Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan nilai t_{hitung} pada Tabel 4.14 maka dapat dilakukan kaidah pengujiannya dengan nilai t_{tabel} , $\alpha = 0,05$ dan $n = 96$, uji satu pihak $dk = n - k - 1$ /
 $dk = 96 - 3 - 1 = 92$, sehingga diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,661$ dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi (X_1)

Nilai t_{hitung} variabel transparansi (X_1) sebesar 4,009 dengan t_{tabel} 1,661 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,009 > 1,661$), dengan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat diartikan bahwa variabel transparansi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

2. Akuntabilitas (X_2)

Nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 2,350 dengan t_{tabel} 1,661 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,350 > 1,661$), dengan nilai signifikan ($0,021 < 0,05$) sehingga dapat diartikan bahwa variabel akuntabilitas (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

3. Partisipasi (X_3)

Nilai t_{hitung} variabel partisipasi (X_3) sebesar 2,789 dengan t_{tabel} 1,661 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,789 > 1,661$), dengan nilai signifikan ($0,006 < 0,05$) sehingga dapat diartikan bahwa variabel partisipasi (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

4.6.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian secara simultan terdapat variabel yang digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji simultan. Pertama adalah membandingkan nilai signifikansi (Sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova:

Pada penelitian ini uji F dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Dengan taraf signifikan sebesar 0,05, $df (N) = n - k - 1 = 96 - 3 - 1 = 92$, dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah banyaknya jumlah sampel, maka dapat ditentukan F_{tabel} pada penelitian ini sebesar 2,47 Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	855.924	3	285.308	32.155	.000 ^b
	Residual	816.315	92	8.873		
	Total	1672.240	95			
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi						

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 32,155 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,47 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ $32,155 > 2,47$ dan probabilitas signifikan $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara simultan terhadap variabel pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi.

4.6.3 Analisis Koefisien Determinasi

Perhitungan nilai koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya atau untuk menyatakan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel Y. Koefisien determinasi (R Square atau R kuadrat) atau disimbolkan dengan " R^2 " yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau

variabel independent (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependent (Y), atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R Square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.

Tabel 4.16
Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.715 ^a	.512	.496	2.979	2.251
a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi					
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa					

Berdasarkan tabel 4.16, diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,512. Nilai R Square 0,512 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau "R", yaitu $0,715 \times 0,715 = 0,512$. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,512 atau sama dengan 51,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X sebesar 51,2% mempengaruhi variabel Y. Sedangkan sisanya ($100\% - 51,2\% = 48,8\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa tahapan 33 dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan, dan Pelaporan serta Pertanggung-jawaban. Berdasarkan asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut menerapkan tata kelola desa yang baik atau *Good Governance* sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat

Hasil temuan penelitian ini diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $32,155 > F_{tabel} 2,47$ dengan angka probabilitas signifikan $0,000 < 0,05$ maka variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,512 atau sama dengan 51,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X sebesar 51,2% mempengaruhi variabel Y. Sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.7.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue

Transparansi merupakan pemberian informasi yang terbuka mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh Fitri (2019) membuktikan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil temuan penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} variabel transparansi sebesar 4,009 dengan t_{tabel} 1,661 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,009 > 1,661$), dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa variabel transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Hal ini didukung oleh penelitian Rasmini (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin baik transparansi dalam pemerintahan desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

4.7.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat.

Hasil temuan penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas sebesar 2,350 dengan t_{tabel} 1,661 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,350 > 1,661$), dengan nilai signifikan $0,021 < 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rasmini (2019) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada

efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas dalam pemerintahan desa maka cenderung semakin tinggi. Serta penelitian Ultafiah (2017) bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa.

4.7.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Dengan adanya pemikiran tersebut, Rasmini (2019) melaksanakan penelitian memperoleh kesimpulan bahwa salah satu variable partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil temuan penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} variabel partisipasi (X_3) sebesar 2,789 dengan t_{tabel} 1,661 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,789 > 1,661$), dengan nilai signifikan $0,006 < 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa variabel partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pringapus dan Priyo (2019) yang menyatakan bahwa penerapan partisipasi masyarakat sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melihat pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
2. Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
3. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
4. Partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

5.2 Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat desa, agar terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagi masyarakat, agar terus berupaya berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dengan pengawasan agar dana yang dikelola dapat dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Bagi pemerintah, agar giat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar aparatur desa dapat mengelola dana desa secara transparansi dan akuntabilitas.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan kajian pengelolaan dana desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dengan melibat variabel selain dari transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M.T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. 2020. Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1-25.
- Adisasmita Rahardjo. 2016. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. 2016. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Geraha Ilmu.
- Amir. 2019. *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja*. Makassar: DE LA.
- Arikunto, S. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arindya. 2019. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia.
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. STIE Bank BPD Jateng Vol 2 No 1.
- BPS: Kecamatan Teupah Tengah Dalam Angka, 2023
- Dethan, A. A., Yohanes, S., & Monteiro, Y. M. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 132-155.
- Dewi dan Adi Priyo. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- Didjaja, Mustopa. 2018. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitri. 2019. Pengaruh Transparasi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desadi Kabupaten Garut).
- Gani, Irawan, dan Siti Amalia. 2015. *Alat Analisis Data - Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*, Edisi 1. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi. 2016. *Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan good governance : Studi kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hartono. 2023. Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2.
- Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy, 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 1 , 230-240.
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86-101.
- Isbandi Rukminto. 2017. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Krina, L. L. 2013. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kristianten. 2016. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kurrohman, T. 2015. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103.
- Lalira, 2018. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemehkabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No. 04.
- Lalolo. 2019. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta
- Lalolo. 2019. *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lili. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah Universitas Tanjungpura.

- Liong, Johny Lumolos dan Michael Mantiri. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1 No. 1.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi 4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Manik, J. 2019. The Political Law Management of the Sea and Coastal Area in Indonesia. *International Conference on Maritime and Archipelago (ICoMA 2018)*, 158–161.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Lima*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
- Mustopa. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Grafika.
- Nasihatun. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 3 No 1.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Pekanbaru: PT Rajagrafindo Persada.
- Oktavia, Norni. 2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pertiwi, D. P. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Jom FEKON* 2 (2) 2(2): 1-15.

- Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 : 1-14.
- Putra, I Made Yoga Darma dan Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.
- Resti. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Volume 4 Nomor 5
- Ribawanto, H., & Said, M. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3. 11.
- Sabarno, Hari. 2017. *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Multivariat*. Bandung: PT. Elex
- Sari. 2022. Faktor-Aktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol 7, No 1.
- Satria, 2021. *Dilema Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Pascal Books.
- Sekaran, U. dan Bougie. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiastuti U. 2022. The Effect Of Transparency, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14 (1).
- Setiawan dkk. 2017. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa* (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). (Online).
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Situmorang. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist* Volume 5 No.1.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, Edy. 2019. *Akuntansi Forensik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

- Sujarweni. 2016. *Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmawati. 2019. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desadi Kabupaten Garut).
- Syahrudin. 2017. *Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Mapakkasungu*. ABDIMAS Vol. 21 No. 2.
- Syamsidar dkk. 2018. Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh).
- Theresia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Ultafiah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Wardiyanto, B. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KATA PENGANTAR

Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr.....

Di tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue”** maka saya:

Nama : Nuryandini

Npm : 2002110014

Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi

Bermaksud untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk meluangkan waktu guna mengisi angket ini untuk keperluan penelitian. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr merupakan pendapat pribadi sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr alami. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban dianggap benar. Identitas dan keterangan yang telah Bapak/Ibu/Sdr berikan akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban karena hanya untuk kepentingan penelitian penyusun skripsi. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam meluangkan waktu untuk mengisi angket ini peneliti mengucapkan terimakasih.

Peneliti

Nuryandini
2002110014

KUESIONER

1	Nama	(boleh tidak diisi)	
2	Alamat		
3	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki	☐ Perempuan
4	Usia	☐ < 20 Tahun ☐ 20-29 Tahun ☐ 30-39 Tahun	☐ 40-49 Tahun ☐ > 50 Tahun
5	Pendidikan Terakhir	☐ SMA ☐ DIPLOMA III ☐ SI	☐ S2 ☐ Lainnya....
6	Perkerjaan	☐ Karyawan/Buruh ☐ PNS/Honorar ☐ Pelajar	☐ Wirausaha ☐ Lainnya...

A. Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dana desa dalam pengelolaannya sudah dirancang perencanaan dengan sangat baik oleh pihak pengelola					
2	Setiap aspek pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa sudah bersesuaian dengan perencanaan sebelumnya					
3	Realisasi dana desa sudah tertata dengan baik dan transparan					
4	Setiap tahapan pengelolaan dana desa dilaporkan kepada masyarakat melalui musyawarah dan mufakat					
5	Realisasi dana desa selalu adanya pertanggung-jawaban dari pihak pengelola					

B. Transparansi (X1)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dana desa yang realisasikan tersedia dokumen rincian antara anggaran masuk dan keluar					
2	Setiap Pembangunan dana desa selalu diberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat					
3	Tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban dana desa selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat					

4	Pengelolaan dana desa direalisasikan berdasarkan peraturan desa yang sudah disepakati					
5	Dana desa dikelola dan disalurkan setelah memberikan informasi dan persetujuan masyarakat banyak					

C. Akuntabilitas (X2)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dana desa yang diterima setiap tahunnya sudah direalisasikan dengan efisien					
2	Realisasi dana desa sudah efektif dalam berbagai bidang Pembangunan SDM, ekonomi dan insfrastruktu					
3	Dana desa yang dikelola sudah produktif dalam memberikan dampak baik bagi masyarakat					
4	Dana desa yang direalisasikan sesuai dengan dana desa yang diterima dari pemerintah					
5	Dana desa yang dikelola dan disalurkan dalam berbagai aspek sesuai kebutuhan masyarakat					

D. Partisipasi (X3)

No	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pengelolaan dana desa melibatkan aparatur desa dan masyarakat					
2	Setiap elemen dilibatkan dalam mengawasi pengelolaan dana desa					
3	Musyawaran terkait pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan akuntabilitas					
4	Masyarakat dalam pengelolaan dana desa diberikan kesempatan untuk berperan di lapangan					
5	Partisipasi masyarakat juga dilibatkan dalam memanfaatkan dana desa seperti kegiatan pemberdayaan UMKM, Pembangunan dan peningkatan SDM					

	E	(X1)	Al	Al ₂ O ₃	Al ₂ SiO ₅	Al ₂ Si ₂ O ₇	Al ₂ Si ₄ O ₁₁	Al ₂ Si ₆ O ₁₇	Al ₂ Si ₈ O ₂₁	Al ₂ Si ₁₀ O ₂₅	Al ₂ Si ₁₂ O ₂₉	Al ₂ Si ₁₄ O ₃₃	Al ₂ Si ₁₆ O ₃₇	Al ₂ Si ₁₈ O ₄₁	Al ₂ Si ₂₀ O ₄₅	Al ₂ Si ₂₂ O ₄₉	Al ₂ Si ₂₄ O ₅₃	Al ₂ Si ₂₆ O ₅₇	Al ₂ Si ₂₈ O ₆₁	Al ₂ Si ₃₀ O ₆₅	Al ₂ Si ₃₂ O ₆₉	Al ₂ Si ₃₄ O ₇₃	Al ₂ Si ₃₆ O ₇₇	Al ₂ Si ₃₈ O ₈₁	Al ₂ Si ₄₀ O ₈₅	Al ₂ Si ₄₂ O ₈₉	Al ₂ Si ₄₄ O ₉₃	Al ₂ Si ₄₆ O ₉₇	Al ₂ Si ₄₈ O ₁₀₁	Al ₂ Si ₅₀ O ₁₀₅	Al ₂ Si ₅₂ O ₁₀₉	Al ₂ Si ₅₄ O ₁₁₃	Al ₂ Si ₅₆ O ₁₁₇	Al ₂ Si ₅₈ O ₁₂₁	Al ₂ Si ₆₀ O ₁₂₅	Al ₂ Si ₆₂ O ₁₂₉	Al ₂ Si ₆₄ O ₁₃₃	Al ₂ Si ₆₆ O ₁₃₇	Al ₂ Si ₆₈ O ₁₄₁	Al ₂ Si ₇₀ O ₁₄₅	Al ₂ Si ₇₂ O ₁₄₉	Al ₂ Si ₇₄ O ₁₅₃	Al ₂ Si ₇₆ O ₁₅₇	Al ₂ Si ₇₈ O ₁₆₁	Al ₂ Si ₈₀ O ₁₆₅	Al ₂ Si ₈₂ O ₁₆₉	Al ₂ Si ₈₄ O ₁₇₃	Al ₂ Si ₈₆ O ₁₇₇	Al ₂ Si ₈₈ O ₁₈₁	Al ₂ Si ₉₀ O ₁₈₅	Al ₂ Si ₉₂ O ₁₈₉	Al ₂ Si ₉₄ O ₁₉₃	Al ₂ Si ₉₆ O ₁₉₇	Al ₂ Si ₉₈ O ₂₀₁	Al ₂ Si ₁₀₀ O ₂₀₅	Al ₂ Si ₁₀₂ O ₂₀₉	Al ₂ Si ₁₀₄ O ₂₁₃	Al ₂ Si ₁₀₆ O ₂₁₇	Al ₂ Si ₁₀₈ O ₂₂₁	Al ₂ Si ₁₁₀ O ₂₂₅	Al ₂ Si ₁₁₂ O ₂₂₉	Al ₂ Si ₁₁₄ O ₂₃₃	Al ₂ Si ₁₁₆ O ₂₃₇	Al ₂ Si ₁₁₈ O ₂₄₁	Al ₂ Si ₁₂₀ O ₂₄₅	Al ₂ Si ₁₂₂ O ₂₄₉	Al ₂ Si ₁₂₄ O ₂₅₃	Al ₂ Si ₁₂₆ O ₂₅₇	Al ₂ Si ₁₂₈ O ₂₆₁	Al ₂ Si ₁₃₀ O ₂₆₅	Al ₂ Si ₁₃₂ O ₂₆₉	Al ₂ Si ₁₃₄ O ₂₇₃	Al ₂ Si ₁₃₆ O ₂₇₇	Al ₂ Si ₁₃₈ O ₂₈₁	Al ₂ Si ₁₄₀ O ₂₈₅	Al ₂ Si ₁₄₂ O ₂₈₉	Al ₂ Si ₁₄₄ O ₂₉₃	Al ₂ Si ₁₄₆ O ₂₉₇	Al ₂ Si ₁₄₈ O ₃₀₁	Al ₂ Si ₁₅₀ O ₃₀₅	Al ₂ Si ₁₅₂ O ₃₀₉	Al ₂ Si ₁₅₄ O ₃₁₃	Al ₂ Si ₁₅₆ O ₃₁₇	Al ₂ Si ₁₅₈ O ₃₂₁	Al ₂ Si ₁₆₀ O ₃₂₅	Al ₂ Si ₁₆₂ O ₃₂₉	Al ₂ Si ₁₆₄ O ₃₃₃	Al ₂ Si ₁₆₆ O ₃₃₇	Al ₂ Si ₁₆₈ O ₃₄₁	Al ₂ Si ₁₇₀ O ₃₄₅	Al ₂ Si ₁₇₂ O ₃₄₉	Al ₂ Si ₁₇₄ O ₃₅₃	Al ₂ Si ₁₇₆ O ₃₅₇	Al ₂ Si ₁₇₈ O ₃₆₁	Al ₂ Si ₁₈₀ O ₃₆₅	Al ₂ Si ₁₈₂ O ₃₆₉	Al ₂ Si ₁₈₄ O ₃₇₃	Al ₂ Si ₁₈₆ O ₃₇₇	Al ₂ Si ₁₈₈ O ₃₈₁	Al ₂ Si ₁₉₀ O ₃₈₅	Al ₂ Si ₁₉₂ O ₃₈₉	Al ₂ Si ₁₉₄ O ₃₉₃	Al ₂ Si ₁₉₆ O ₃₉₇	Al ₂ Si ₁₉₈ O ₄₀₁	Al ₂ Si ₂₀₀ O ₄₀₅	Al ₂ Si ₂₀₂ O ₄₀₉	Al ₂ Si ₂₀₄ O ₄₁₃	Al ₂ Si ₂₀₆ O ₄₁₇	Al ₂ Si ₂₀₈ O ₄₂₁	Al ₂ Si ₂₁₀ O ₄₂₅	Al ₂ Si ₂₁₂ O ₄₂₉	Al ₂ Si ₂₁₄ O ₄₃₃	Al ₂ Si ₂₁₆ O ₄₃₇	Al ₂ Si ₂₁₈ O ₄₄₁	Al ₂ Si ₂₂₀ O ₄₄₅	Al ₂ Si ₂₂₂ O ₄₄₉	Al ₂ Si ₂₂₄ O ₄₅₃	Al ₂ Si ₂₂₆ O ₄₅₇	Al ₂ Si ₂₂₈ O ₄₆₁	Al ₂ Si ₂₃₀ O ₄₆₅	Al ₂ Si ₂₃₂ O ₄₆₉	Al ₂ Si ₂₃₄ O ₄₇₃	Al ₂ Si ₂₃₆ O ₄₇₇	Al ₂ Si ₂₃₈ O ₄₈₁	Al ₂ Si ₂₄₀ O ₄₈₅	Al ₂ Si ₂₄₂ O ₄₈₉	Al ₂ Si ₂₄₄ O ₄₉₃	Al ₂ Si ₂₄₆ O ₄₉₇	Al ₂ Si ₂₄₈ O ₅₀₁	Al ₂ Si ₂₅₀ O ₅₀₅	Al ₂ Si ₂₅₂ O ₅₀₉	Al ₂ Si ₂₅₄ O ₅₁₃	Al ₂ Si ₂₅₆ O ₅₁₇ </
--	---	------	----	--------------------------------	----------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

24	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	1	1	1	1	4	5	3	2	2	1	3	5	3	3	3	3	5	3	3
26	3	2	3	3	3	1	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3
27	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	2	3	3	3	3	1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	1	2	3	3	4	2	1	2	2	3	2	3	2	2	1	3	4	3	3
33	3	3	4	4	4	5	1	5	1	1	2	2	3	3	3	4	4	3	4
34	3	3	3	3	3	2	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3
35	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	3	3	5	5	5
36	3	3	3	2	3	2	2	3	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
37	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
38	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5	5	4	5
39	2	3	4	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4
42	3	3	3	3	2	5	3	5	5	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2
43	3	3	3	3	3	5	5	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	2	5	5	5	5	5	2	1	1	3	2	3	5	4	4
45	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
46	3	3	4	4	5	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
47	4	2	3	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
48	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4
49	2	2	2	3	4	4	5	5	5	4	4	3	4	3	1	4	4	3	3
50	1	1	1	1	3	5	5	5	5	5	2	2	2	2	1	3	3	3	3

51	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3
52	1	1	2	1	2	3	2	4	3	3	1	1	4	1	2	1	4	3	4	4
53	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
54	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
55	4	4	1	3	3	4	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
56	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	1	2	5	5	4	5	5	5	5	5
57	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
59	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	4	2	4	4	3	5	5
60	3	3	3	3	4	3	2	4	5	3	5	5	4	4	2	4	4	3	4	3
61	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	2	3	4	4	4	4	5
62	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3
63	5	4	4	4	5	2	2	3	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
64	4	4	3	3	5	4	2	4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
65	5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5
66	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
67	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
68	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	3	3	4	4	5	3	3	3	3
69	2	2	3	2	2	2	3	2	4	2	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4
70	3	4	4	5	4	5	3	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	3	3	3
71	1	1	1	1	1	3	2	1	2	1	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3
72	1	3	3	3	4	1	1	2	2	3	1	2	2	2	2	4	2	2	2	2
73	4	3	3	4	3	2	3	4	4	2	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
75	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	2	2	2	2
76	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	4	1	2	3	3	4	3	3	3	3
77	3	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3

78	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4
79	4	4	3	4	4	2	3	1	1	4	1	3	3	3	3	4	3	4	3	3
80	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5
81	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	2
82	1	4	3	5	3	2	1	1	1	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	2	3	1	1	1	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
84	5	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	2	5	4	4	4
85	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3
86	3	1	2	1	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	1	5	5	5	5
87	4	3	2	2	2	4	3	4	3	1	2	2	2	3	4	2	4	4	4	4
88	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	3	2	4	4	4	3
89	2	4	1	3	3	3	2	3	3	3	3	1	1	1	3	3	4	3	3	4
90	1	4	4	4	5	1	1	4	1	2	1	1	2	1	2	5	3	3	3	3
91	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
92	2	4	4	4	5	3	3	3	3	2	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4
93	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
94	5	3	3	3	4	1	2	5	5	4	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
95	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
96	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

a. Varaiabel X1

Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
X1	Pearson Correlation	1	.582**	.489**	.486**	.408**	.722**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2	Pearson Correlation	.582**	1	.689**	.758**	.591**	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3	Pearson Correlation	.489**	.689**	1	.817**	.635**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X4	Pearson Correlation	.486**	.758**	.817**	1	.699**	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X5	Pearson Correlation	.408**	.591**	.635**	.699**	1	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
TOTAL	Pearson Correlation	.722**	.867**	.868**	.901**	.803**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel X2

Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
X1	Pearson Correlation	1	.564**	.540**	.421**	.483**	.726**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2	Pearson Correlation	.564**	1	.663**	.761**	.598**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3	Pearson Correlation	.540**	.663**	1	.748**	.587**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X4	Pearson Correlation	.421**	.761**	.748**	1	.627**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X5	Pearson Correlation	.483**	.598**	.587**	.627**	1	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
TOTAL	Pearson Correlation	.726**	.875**	.856**	.866**	.797**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel X3

		Correlations					
		X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
X1	Pearson Correlation	1	.619**	.426**	.574**	.385**	.761**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2	Pearson Correlation	.619**	1	.715**	.602**	.474**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3	Pearson Correlation	.426**	.715**	1	.619**	.463**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X4	Pearson Correlation	.574**	.602**	.619**	1	.603**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X5	Pearson Correlation	.385**	.474**	.463**	.603**	1	.716**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
TOTAL	Pearson Correlation	.761**	.863**	.809**	.845**	.716**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Y

		Correlations					
		X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
X1	Pearson Correlation	1	.430**	.376**	.372**	.388**	.615**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X2	Pearson Correlation	.430**	1	.802**	.862**	.799**	.909**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X3	Pearson Correlation	.376**	.802**	1	.886**	.844**	.910**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X4	Pearson Correlation	.372**	.862**	.886**	1	.875**	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X5	Pearson Correlation	.388**	.799**	.844**	.875**	1	.911**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
TOTAL	Pearson Correlation	.615**	.909**	.910**	.929**	.911**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4. Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.886	5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.883	5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.858	5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

Lampiran 5. Deskripsi Tanggapan Responden

ITEM1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	10.4	10.4	10.4
	TS	15	15.6	15.6	26.0
	CS	40	41.7	41.7	67.7
	S	21	21.9	21.9	89.6
	SS	10	10.4	10.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	7	7.3	7.3	7.3
	TS	10	10.4	10.4	17.7
	CS	43	44.8	44.8	62.5
	S	29	30.2	30.2	92.7
	SS	7	7.3	7.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	8.3	8.3	8.3
	TS	13	13.5	13.5	21.9
	CS	42	43.8	43.8	65.6
	S	28	29.2	29.2	94.8
	SS	5	5.2	5.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	8.3	8.3	8.3
	TS	11	11.5	11.5	19.8
	CS	38	39.6	39.6	59.4
	S	31	32.3	32.3	91.7
	SS	8	8.3	8.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.1	3.1	3.1
	TS	15	15.6	15.6	18.8
	CS	29	30.2	30.2	49.0
	S	32	33.3	33.3	82.3
	SS	17	17.7	17.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	8.3	8.3	8.3
	TS	12	12.5	12.5	20.8
	CS	30	31.3	31.3	52.1
	S	29	30.2	30.2	82.3
	SS	17	17.7	17.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	11	11.5	11.5	11.5
	TS	16	16.7	16.7	28.1
	CS	26	27.1	27.1	55.2
	S	25	26.0	26.0	81.3
	SS	18	18.8	18.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	8.3	8.3	8.3
	TS	10	10.4	10.4	18.8
	CS	29	30.2	30.2	49.0
	S	31	32.3	32.3	81.3

	SS	18	18.8	18.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	9.4	9.4	9.4
	TS	13	13.5	13.5	22.9
	CS	25	26.0	26.0	49.0
	S	30	31.3	31.3	80.2
	SS	19	19.8	19.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM10					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	9.4	9.4	9.4
	TS	12	12.5	12.5	21.9
	CS	32	33.3	33.3	55.2
	S	27	28.1	28.1	83.3
	SS	16	16.7	16.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM11					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	9.4	9.4	9.4
	TS	15	15.6	15.6	25.0
	CS	33	34.4	34.4	59.4
	S	28	29.2	29.2	88.5
	SS	11	11.5	11.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM12					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	9.4	9.4	9.4
	TS	19	19.8	19.8	29.2
	CS	32	33.3	33.3	62.5
	S	24	25.0	25.0	87.5

	SS	12	12.5	12.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM13					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	8.3	8.3	8.3
	TS	14	14.6	14.6	22.9
	CS	37	38.5	38.5	61.5
	S	27	28.1	28.1	89.6
	SS	10	10.4	10.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM14					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	8.3	8.3	8.3
	TS	14	14.6	14.6	22.9
	CS	42	43.8	43.8	66.7
	S	24	25.0	25.0	91.7
	SS	8	8.3	8.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM15					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	6.3	6.3	6.3
	TS	17	17.7	17.7	24.0
	CS	45	46.9	46.9	70.8
	S	21	21.9	21.9	92.7
	SS	7	7.3	7.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM16					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.2	4.2	4.2
	TS	14	14.6	14.6	18.8
	CS	35	36.5	36.5	55.2

	S	27	28.1	28.1	83.3
	SS	16	16.7	16.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM17					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	11	11.5	11.5	13.5
	CS	31	32.3	32.3	45.8
	S	33	34.4	34.4	80.2
	SS	19	19.8	19.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM18					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	14	14.6	14.6	16.7
	CS	40	41.7	41.7	58.3
	S	27	28.1	28.1	86.5
	SS	13	13.5	13.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

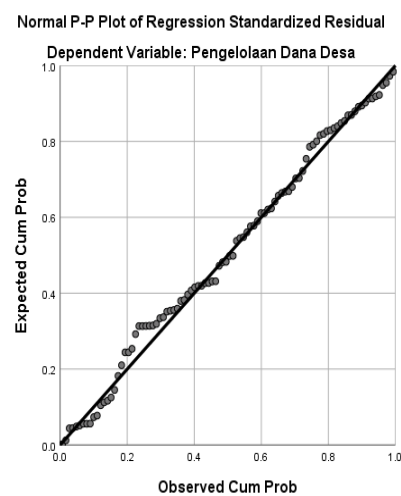
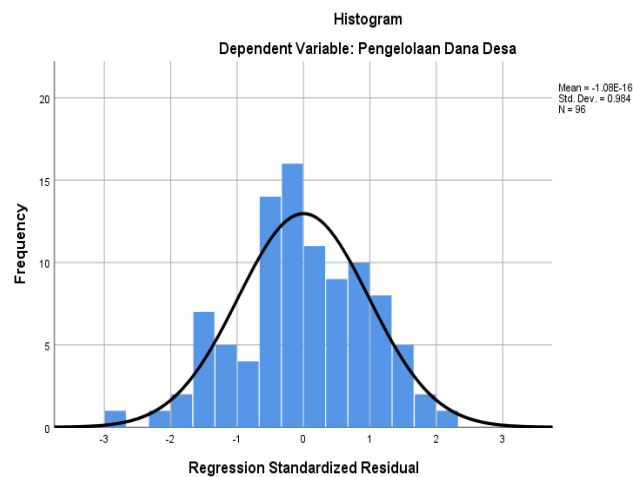
ITEM19					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	12	12.5	12.5	12.5
	CS	37	38.5	38.5	51.0
	S	31	32.3	32.3	83.3
	SS	16	16.7	16.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

ITEM20					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	13	13.5	13.5	15.6
	CS	38	39.6	39.6	55.2
	S	27	28.1	28.1	83.3
	SS	16	16.7	16.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.93134661
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.040
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		



b. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.305	1.360		3.166	.002		
	Transparansi	.362	.090	.369	4.009	.000	.626	1.597
	Akuntabilitas	.179	.076	.211	2.350	.021	.661	1.514
	Partisipasi	.269	.096	.274	2.789	.006	.548	1.825

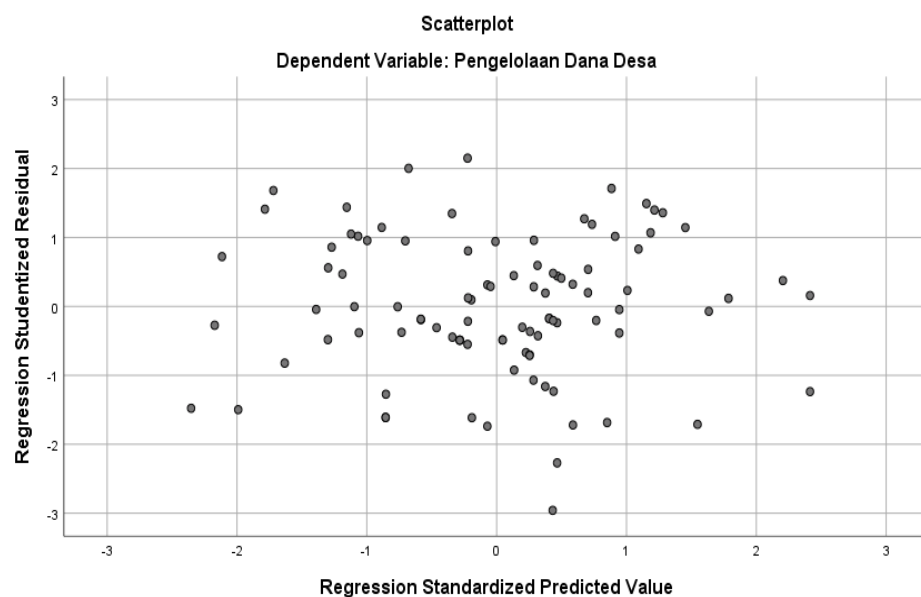
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

c. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.715 ^a	.512	.496	2.979	2.251

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

d. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7. Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.305	1.360		3.166	.002		
	Transparansi	.362	.090	.369	4.009	.000	.626	1.597
	Akuntabilitas	.179	.076	.211	2.350	.021	.661	1.514
	Partisipasi	.269	.096	.274	2.789	.006	.548	1.825

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi
1	1	3.896	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.042	9.630	.32	.11	.77	.00
	3	.036	10.400	.65	.30	.11	.21
	4	.026	12.151	.03	.59	.12	.79

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	10.24	24.55	17.30	3.002	96
Std. Predicted Value	-2.353	2.414	.000	1.000	96
Standard Error of Predicted Value	.313	1.273	.578	.189	96
Adjusted Predicted Value	10.57	24.82	17.28	3.016	96
Residual	-8.598	6.371	.000	2.931	96
Std. Residual	-2.886	2.139	.000	.984	96
Stud. Residual	-2.958	2.151	.004	1.007	96
Deleted Residual	-9.030	6.442	.023	3.073	96
Stud. Deleted Residual	-3.093	2.195	.002	1.018	96
Mahal. Distance	.060	16.369	2.969	2.728	96
Cook's Distance	.000	.110	.012	.019	96
Centered Leverage Value	.001	.172	.031	.029	96

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	855.924	3	285.308	32.155	.000 ^b
	Residual	816.315	92	8.873		
	Total	1672.240	95			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.715 ^a	.512	.496	2.979	2.251

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Lampiran 8. Tabel T

Pr	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002
df	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678

25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451

53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Lampiran 9. Tabel F

Df untuk penyebut (N2)	Df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27

24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02

52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95

80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93